Membangun Harmoni di Masyarakat Plural: Pandangan Psikologi dan Pedagogi Perdamaian

Yayah Khisbiyah

”Buya”, panggilan kesayangan dan hormat kami kepada Profesor Ahmad Syafii Maarif, telah dengan cemerlang memaparkan persoalan politik identitas dan kaitannya dengan kehidupan majemuk pada tataran global-internasional dan domestik-nasional dewasa ini dan masa depan. Persoalan intoleransi dan kekerasan ideologis yang diilustrasikan Buya kian menegaskan bahwa sebagian kita memang memiliki masalah serius dengan toleransi dan pengakuan terhadap kemajemukan dan ke-*bhinneka*-an yang merupakan kenyataan imperatif. Akibatnya, ketegangan dan bahkan konflik sosial penuh kekerasan yang destruktif pun kerap terjadi.

Sebagai tanggapan, sekalian melengkapi pidato Buya, tulisan ini akan menilik persoalan intoleransi, kebencian, dan kekerasan antarkelompok dari perspektif psikologi sosial dan studi perdamaian. Ini sekaligus untuk melengkapi kajian dari perspektif keilmuan lainnya mengenai politik identitas dan pluralisme. Di bagian akhir dipaparkan usulan solusi mengatasi carut-marut intoleransi dan kebencian dalam permainan politik identitas, melalui jalan pendidikan perdamaian pada salah satu agen sosialisasi terpenting: sekolah.

Manusia Mencipta Kotak-kotak Semu

Erik H. Erikson, tokoh psikologi perkembangan-sosial terkemuka, mengintodusir terma *pseudo-speciation* (1968). *Species* berarti klasifikasi makhluk hidup ke dalam ciri-ciri biologis yang sama, di mana anggota kelompok yang sama dapat saling mengawini dan beranak-pinak, tetapi anggota kelompok yang berbeda tidak bisa melakukannya. *Pseudo* berarti palsu atau semu. Berdasarkan genetikanya (*genetic-speciation*), manusia adalah spesies yang sama. Tetapi menurut Erikson, secara sosial-budaya (*psychosocial-speciation*), spesies manusia yang satu ini lalu memilah diri menjadi ratusan ribu suku bangsa dengan berbagai bahasa, adat istiadat, agama, dan ideologi berbeda. Terma *pseudo-speciation* atau spesiasi-semu menunjuk pada fakta bahwa perbedaan budaya menyebabkan manusia terpilah-pilah ke dalam berbagai kelompok sosial.

Pengotakan budaya ini memberi *sense of identity* yang membuat anggota suatu kelompok merasa berbeda dan memiliki superioritas dibanding kelompok lainnya. Setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya istimewa; merasa diciptakan untuk hadir ke tengah semesta oleh kehendak supranatural dengan tujuan paling mulia. Masing-masing merasa memiliki lokus geografis, ekonomi, sosial-budaya dan teologi khusus dan lebih unggul dari kelompok-kelompok lainnya. Perasaan ini membuat setiap kelompok ingin mendapatkan ruang dan momentum yang unik dalam meng-ada (*to exist*) dan men-jadi (*to be*) di tengah alam semesta. Pada gilirannya, perasaan menjadi "pusat alam semesta" (*center of the universe*) ini makin mengafirmasi superioritasnya di atas segala kelompok lain.

Spesiasi-semu ini mendorong manusia untuk membekali diri, kelompok dan semestanya dengan peralatan dan senjata, peran dan aturan, legenda, mitos, dan ritus. Semua ini berfungsi mengikat anggotanya dalam kebersamaan, dan memberi anggotanya identitas sosial sebagai kelompok yang superior, serta memiliki arti penting di dunia. Pada urutannya, secara positif identitas kelompok mampu melahirkan loyalitas pada bangsa, heroisme, dan seni susastra. Pen-

dek kata, identitas kelompok mampu memberi kontribusi penting dalam menggerakkan peradaban manusia. Ini adalah sisi terang dari spesiasi-semu.

Namun, spesiasi-semu juga memiliki sisi gelap. Sejarah menunjukkan bahwa hanya sedikit suku bangsa dan kelompok budaya yang berhasil menjalankan proses spesiasi-semu ini secara damai dalam kurun waktu lama. Ketika terjadi perubahan penuh guncangan, maka gagasan menjadi spesies paling unggul dipertahankan melalui ketakutan yang fanatik dan kebencian terhadap kelompok lain. Kelompok lain dianggap sebagai ancaman yang akan mengurangi kedigdayaan, kesejahteraan dan keunggulan kelompok sendiri, dan karenanya, harus dilemahkan atau dihilangkan dengan cara menyerang dan menaklukkan melalui perang, atau dengan membuat aturan, adat, dan perundangan yang diskriminatif terhadap "kelompok lain" dan "orang asing".

Dinamika survival dasar ini dimiliki oleh umat manusia secara universal. Sisi gelap spesiasi-semu dapat menjadi lebih intens dan dominatif di bawah pengaruh displasi sejarah dan deprivasi ekonomi, yang membuat idealisasi-diri (*self-idealization*) masing-masing kelompok lebih eksklusif dan defensif.

Spesiasi-semu kerap membawa kita melakukan dehumanisasi terhadap kelompok budaya lain. Sejarah modern mencatat bahwa mentalitas spesiasi-semu tidak secara otomatis hilang walau manusia telah banyak mengalami kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Bahkan negara-negara yang dianggap paling beradab dan "maju" pun dapat dicengkeram oleh mentalitas spesiasi-semu yang fanatik, brutal dan banal. Kemenangan cengkeraman mentalitas ini dicontohkan oleh Nazi Jerman di bawah kekuasaan Hitler, dengan melakukan genosida terhadap kaum Yahudi (Staub, 1989). Sisi gelap spesiasi-semu semacam ini, sedihnya, kini semakin kerap terjadi dan menjadi obsesi resiprokal dari banyak kelompok, seiring dengan semakin berkurangnya sumberdaya yang mampu mencukupi kebutuhan semua umat manusia di bumi renta yang makin terkuras kekayaannya ini.

Intoleransi dan Kebencian Bernuansa Agama

Terutama setelah peristiwa pengeboman WTC New York pada 11 September 2001, fenomena intoleransi dan permusuhan bernuansa agama menguat. Konflik yang terjadi dewasa ini bukan hanya konflik realistik berdasar perebutan sumberdaya bumi yang terbatas, tetapi juga konflik identitas, termasuk identitas agama, meski konflik realistik dan konflik identitas tak dapat dipisahkan oleh garis batas yang jelas. Bahkan, keduanya kerap saling mempengaruhi.

Tak terbantahkan agama telah memainkan peran sangat penting dalam memajukan peradaban manusia. Dalam upayanya mencari kedamaian dan kebahagiaan, banyak manusia mengandalkan agama sebagai jalan menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri, maupun sebagai jalan menciptakan perdamaian bagi kemanusiaan di muka bumi. Lebih dari sekadar membentuk manusia yang memiliki moral dan etika individual, sejarah sosial juga menunjukkan bahwa agama mampu menjadi inspirasi dan sumber penggerak bagi perubahan sosial positif, termasuk untuk gerakan hak-hak sipil (Giddens, 2001; Cortright, 2008; Barash & Webel, 2009). Sebagai misal, di Jerman pada 1934, 45% pemimpin agama bergabung dengan Confessing Church melawan rasisme Nazi. Contoh lain, Martin Luther King Jr. dan Malcolm X mendobrak penindasan kulit putih terhadap kulit hitam di AS, masing-masing berlandaskan teologi liberatif dari Kristen dan Islam (Myers, 1994). Sementara itu, Ayatullah Khomeini dan para mullah di Iran menumbangkan rezim despotik-otoriter Shah Reza Pahlevi secara damai pada 1979.

Namun, pada saat yang sama, agama dan ajaran agama juga dipakai untuk melegitimasi penganiayaan dan penghukuman terhadap orang dan kelompok yang tak memiliki keyakinan yang sama. Jadi, ada juga bahaya yang mengintai dari balik wajah mulia agama, antara lain berupa intoleransi dan kebencian, yang pada gilirannya menjustifikasi kekerasan dan kekejaman. William James, psikolog yang meletakkan fondasi psikologi agama, menyatakan: "*Piety is the mask*" (1902). Kesalehan adalah topeng. Ia merujuk pada keberagamaan

yang kadang menampilkan ekspresi suci sambil menyembunyikan motif buruk. Adagium ini terus relevan hingga saat ini. Sebagai contoh, pastor G. Zabelka saat pemboman Hiroshima di akhir PD II, dan George W. Bush saat menyerbu Irak di 2003, sama-sama menyatakan: *"God is on the side of our country; God is our friend."* Kalimat serupa juga diucapkan oleh Osama Bin Laden, para pelaku pengeboman Bali, dan separatis Chechnya saat menyandera dan membunuh anak-anak sekolah di Beslan-Russia.

John M. Hull dari Birmingham University, Inggris, menciptakan terma *religionisme* (1992, 2000), yang dimaksudkannya sebagai sebuah isme atau ideologi—serupa seperti rasisme—yang meyakini bahwa agama milik sendirilah satu-satunya yang benar dan valid, sedangkan agama orang lain salah. Menurut Hull, *religionisme*—di bawah, saya menterjemahkannya sebagai "agamaisme"—cenderung mendorong para penganutnya untuk tunduk pada solidaritas tribalistik. Identitas yang digunakan oleh agamaisme bersandar pada sikap penolakan dan eksklusifisme atau ketertutupan: "Kami lebih baik dari mereka: kami terselamatkan, mereka terlaknat; kami shaleh, mereka murtad; kami beriman, mereka kafir". Mereka adalah orang asing, orang lain, *liyan*, yang mengancam kita dan mengancam jalan hidup kita.

Menurut Hull lagi, agamaisme terbentuk bukan semata-mata karena tipe kepribadian atau corak beragama individu. Agamaisme memiliki akar sosio-historis dalam ideologi yang dianut masyarakat dan dikuatkan serta dilanggengkan oleh lembaga-lembaga agen sosialisasi dalam permainan politik identitas. Ini bisa berlangsung antara lain lewat bacaan, atau apa yang oleh James Aho (1994) disebut *library of infamy* atau "perpustakaan kebencian": bahwa media, sebagai salah satu agen sosialisasi, juga ampuh menebar permusuhan secara efektif. Aho mencontohkan para pendukung gerakan agama ekstremis sayap kanan, yang mengkonstruksi pahlawan mereka dan membenci musuh melalui bacaan mereka yang anti-Islam, anti-Kristen, anti-imigran. Hal yang sama berlaku untuk buku anti-semitisme, anti-komunisme, dan semacamnya.

Secara spesifik, Hull mengarahkan kritiknya pada pelajaran agama di sekolah, yang hanya mengajarkan agama yang dipeluk oleh siswa yang bersangkutan, bukan tentang berbagai agama yang ada di lingkungan sekitar siswa, atau lebih luas lagi, yang ada di dunia. Akibatnya, muncullah pandangan dan sikap *self-glory* (kami lebih mulia), *self-righteous* (kami lebih saleh), dan *holier-than-thou* (kami lebih suci). Sikap-sikap ini perlu diwaspadai karena cenderung memperburuk konflik sosial, bukan menyelesaikannya.

Senada dengan Hull, Johan Galtung (1996) mengemukakan terma *hard religion* sebagai lawan dari *soft religion*. Setiap agama memiliki elemen keras dan lembut, dalam berbagai derajatnya. Dengan elemen lembut atau lunak agama, yang dimaksudkannya adalah sisi-sisi agama yang *"warm, compassionate, reaching out horizontally to everybody, to all life, to the whole world."* Sedangkan sisi-sisi keras agama diidentifikasikannya melalui *"its simple, primitive sentiments and a sense of chosenness: 'my religion is right, yours is simply wrong; the world would be better without you'."* Tutur Galtung, dalam "keberagamaan keras":

> Hati menjadi beku, cinta tak lagi mendapat jalan; yang mampu dilihat hanyalah apa yang memecah-belah, bukan apa yang menyatukan atau merengkuh yang lain, semua yang lain. Eksklusivitas terbangun dalam pikiran mereka melalui dogma yang aksiomatis, dan dalam perilaku mereka melalui lembaga agama vertikal. Dogma, dan lembaga kuil/sinagog/ gereja/masjid merampas hidup mereka dan membawanya jauh dari pesan persatuan, kesatuan, dan kesetaraan; mereka makan dari jiwa yang dingin, yang membeku. Kebencian, kekerasan, dan perang sangat mudah tumbuh subur manakala cinta telah mati.

Respon Pendidikan Menantang Intoleransi Agama

Di tengah konteks menguatnya agamaisme dan *hard religion* dewasa ini, makin penting bagi penganut agama yang *pacifist* (cinta damai) dan inklusif untuk melakukan upaya-upaya eliminasi intoleransi dan kebencian bernuansa agama melalui berbagai program strategis secara sistemik.

Intoleransi dan permusuhan yang dibentuk oleh permainan politik identitas yang berjalin-berkelindan dengan pemahaman agama dogmatis-divisif yang dipaparkan Buya Syafii Maarif, jelaslah tidak menyantuni multikulturalitas dan pluralitas, tapi justru menegasikannya sehingga ikut mempertajam segregasi sosial dan mengeskalasi konflik sektarian. Dalam konteks masalah seperti ini, maka amat mendesak dan strategis bagi kita untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan paradigma, pendekatan, dan metode pendidikan yang mampu menyantuni multikulturalisme dan pluralisme, sehingga ketegangan dan pertikaian etnoreligius antarkelompok dapat dikurangi, digantikan oleh kehidupan bersama yang lebih adil, damai, dan menebarkan berkah bagi seluruh warga masyarakat. Dalam konteks ini, salah satu tugas utama lembaga pendidikan dan agama yang strategis dan mendesak adalah membentuk karakter pasifis atau cinta damai di kalangan peserta didik, serta menginternalisasikan sikap toleran dan apresiatif terhadap perbedaan dan ke*bhinneka*-an.

Dasar pemikirannya adalah bahwa lembaga agama dan lembaga pendidikan mempunyai peran besar dalam membentuk karakter para jamaah/penganut dan peserta didiknya secara klasikal, di mana lembaga-lembaga ini secara langsung maupun tak langsung mengajarkan dan mentransmisikan muatan budaya tertentu, berupa nilai-nilai, sikap, peran, dan pola-pola perilaku. Lembaga agama dan pendidikan seharusnya mampu menjadi *guiding light* yang berfungsi menuntun manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, untuk misalnya mampu mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan keadaban (*civility*), seperti menghargai pandangan dan hak asasi orang lain, menghindari kekerasan, menghormati keanekaragaman, dan mematuhi hukum. Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralitas harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur. Banyak literatur (misalnya Allport, 1954; St. John, 1975; Stephan,1996; Mays, 1998) menyatakan, salah satu prasyarat bagi terwujudnya hubungan antarkelompok yang

lebih harmonis adalah menghilangkan prasangka, intoleransi, dan permusuhan terhadap kelompok lain.

Lembaga agama dan pendidikan dapat membantu mengurangi intoleransi antarkelompok ini dengan menerapkan dakwah dan sistem pendidikan yang mengapresiasi pluralitas dan multikulturalitas. Tak kurang dari UNESCO, satu badan penting di bawah PBB, yang menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan bukanlah hanya terbatas pada *learning to know, learning to do* dan *learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Artinya, pendidikan seharusnya mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat untuk menghargai kemajemukan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk hidup bersama secara rukun sebagai sesama umat manusia. Ini sejalan pula dengan pandangan Aho (1994), bahwa karena konstruksi "musuh" terjadi secara sosial, maka imaji musuh pun harus didekonstruksi secara sosial pula. Artinya, upaya mengeliminir permusuhan, kebencian, dan intoleransi perlu dilakukan di tingkat institusional-kelembagaan, termasuk institusi pendidikan dan agama. Aho menganggap terapi dan konseling individual tidak akan efektif menetralisir imaji tentang "musuh" yang telah dibangun secara sosial.

Langkah strategis pertama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita besar ini adalah mengubah paradigma dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan budaya dalam lembaga keagamaan dan sistem pendidikan. Wawasan pluralisme dan multikulturalisme yang inklusif, toleran, dan non-sektarian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang telah lama diingkari melalui uniformitas yang dipaksakan melalui dominasi sosial-politik Orde Baru yang berlanjut hingga sekarang. Pendekatan *truth-claim* dogmatis dalam dakwah dan pendidikan agama, serta pendekatan sentralistik dan segregatif dalam pendidikan selama ini kurang mempertimbangkan keunikan lokal *indigenous* dengan nilai sosial budayanya yang kaya dan beragam, sehingga kurang memberi ruang bagi

tumbuhnya apresiasi terhadap budaya-budaya "yang lain" *(the others)*. Pendekatan semacam ini perlu diubah menjadi pendekatan desegregasi, toleransi dan apresiasi yang mengajarkan kepada penganut agama dan peserta didik untuk menghargai dan mengembangkan potensi dan sumber daya sosial-budaya yang ada dalam komunitasnya masing-masing. Namun, pada saat yang sama mereka juga dididik untuk mampu mengenali dan mengapresiasi budaya-budaya lain yang berbeda.

Langkah selanjutnya adalah melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan mata pelajaran agama, yang sejalan dengan wawasan multikulturalisme. Berkaitan dengan ini, juga perlu dirumuskan kembali *shared concerns* dan *common goals* dari berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama dalam payung kebangsaan Indonesia dan payung kemanusiaan yang satu, untuk kemudian mengimplementasikannya bersama-sama.

Tugas besar berikutnya adalah menyusun kurikulum yang berpendekatan lintas-budaya (*cross-cultural*), dan merumuskan metode belajar-mengajar alternatif yang bertujuan menghasilkan warga masyarakat yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap kemajemukan masyarakat di sekelilingnya (Mays, 1998). Beberapa gagasan dasar yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun metode pendidikan yang menyantuni multikulturalisme akan dikemukakan berikut ini:

Pertama, menjadikan program pendidikan apresiasi multikulturalisme/pluralisme sebagai kebijakan resmi oleh institusi pendidikan dan institusi agama, untuk kemudian diterjemahkan dan dijabarkan melalui prinsip-prinsip otonomi pendidikan dan manajemen pendidikan berbasis kompetensi sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan komunitas lokal di daerah masing-masing. Materi program ini berisi pengetahuan dan kompetensi interrelasi antarbudaya, yang menekankan pada pembelajaran untuk tinggal dan hidup bersama dengan orang-orang yang berlatar budaya

berlainan. Program ini memiliki dua fokus: pelestarian budaya dan partisipasi budaya.

Kedua, mengembangkan proses dan metode belajar-mengajar yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi sosial yang ada pada komunitas lokal setempat, untuk menumbuhkembangkan *social competence* anak didik (secara individual) dan *social capital* (secara kolektif), dengan tujuan menciptakan dan memelihara harmoni dalam relasi sosial. Untuk ini perlu dikembangkan materi ajar yang mengadopsi pengetahuan lokal dan sesuai dengan kebutuhan lokal. *Curriculum-based education* harus diimbangi dengan *community-based education* yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas lokal, penghargaan pada pluralitas, pemecahan masalah secara kreatif, penyelesaian konflik secara damai, dan penumbuhan moralitas publik serta akhlak sosial.

Ketiga, menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam menerjemahkan muatan etika relasi sosial, dan berfungsi sebagai *role model* yang nyata *(living model)* dalam menanamkan sikap *tepa slira (empathy)* dan toleransi serta apresiasi yang inklusif pada anak didik. Tenaga pendidik harus mampu memberi teladan penegakan asas demokrasi yang mengakomodasi perbedaan, baik dalam interaksi vertikal (antara guru dan murid) maupun interaksi horizontal (murid dengan murid atau guru dengan guru). Metode pengajaran otoriter-dogmatis yang menuntut kepatuhan buta harus dihindari, karena ia hanya menghasilkan manusia-manusia robotik yang tidak memiliki sensitivitas terhadap lingkungan sosialnya. Sebagai gantinya, perlu dikembangkan metodologi pengajaran yang dialogis dan interaktif, serta mampu mengembangkan daya pikir, daya nalar, dan empati anak didik. Tenaga pendidik harus membekali anak didik tidak saja dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional (Goleman, 1995) dan kecerdasan moral (Coles, 1997).

Keempat, memodifikasi kurikulum agar lebih banyak berisi muatan toleransi dan apresiasi terhadap budaya dan kelompok lain. Menanamkan sikap toleran dan apresiatif-inklusif dapat dilakukan

dengan dua cara. Pertama, hal itu disisipkan ke dalam mata pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dasar pemikirannya adalah karena toleransi dan apresiasi terhadap kemajemukan dan perbedaan adalah bagian integral dari sikap keberagamaan yang inklusif dan sikap sebagai warga negara yang santun-beradab, sehingga mata pelajaran Agama dan PPKn tidak dapat menanggalkan pendidikan toleransi. Kedua, diberikan secara mandiri dalam mata pelajaran tersendiri, misalnya dengan nama pelajaran Pendidikan Damai (*Peace Education*). Dasar pemikirannya adalah karena jika hanya disisipkan pada mata pelajaran lain maka dikhawatirkan penanaman sikap toleran dan inklusif kurang mendapat prioritas dan *reinforcement*.

Kelima, mempopulerkan program-program pertukaran budaya *(cross-cultural exchange program),* seperti program *Schools Combat Racism* di Amerika Serikat misalnya, yang memfasilitasi kontak, komunikasi, interaksi, dan kerja sama di antara anak didik yang berasal dari kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda (Slovan, 1997; Vogt, 1997). *Exchange program* perlu disemarakkan terutama pada sekolah-sekolah yang berafiliasi agama yang cenderung divisif-segregatif (Allport, 1954; Pettigrew, 1997). Sekolah yang berbasis agama tertentu perlu difasilitasi untuk banyak melakukan kontak, interaksi, dan kerja sama dengan sekolah berbasis agama berbeda. Dasar pemikirannya adalah bahwa dalam kegiatan pertukaran budaya biasanya terjadi *sharing* perasaan, pengalaman, dan memori kolektif. Terjadi pertukaran harapan, kecemasan, kerinduan, dan visi tentang masa depan bersama. Juga terjadi komunikasi dan dialog empatik mengenai keserupaan dan keragaman sehingga mampu mengeliminir bias, stereotip dan prasangka, yang pada gilirannya membuat kerukunan dalam kehidupan bersama lebih mudah terwujud.

Akhir Kalam

Saya setuju dengan Buya, bahwa sikap mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendirian akan makin membuyarkan

persaudaraan Muslim. Sikap mendaku kebenaran dan arogansi teologis bermuara pada kehancurkan peradaban. Salah satu upaya untuk mengeliminir sikap di atas, atau mentalitas spesiasi-semu jika merujuk pada Erik H. Erikson, kita harus mengembangkan identitas yang lebih luas dan inklusif (*wider, inclusive identities*), disertai dengan realisme dan kekuatan spiritual agar manusia mampu hidup berdampingan dengan sesamanya dengan rasa saling hormat. Dengan identitas inklusif, manusia tidak hanya mampu melakukan identifikasi empatik dengan orang lain, tetapi juga memiliki kerelaan untuk memahami *the otherness* (perbedaan) dan persamaan di antara sesama, dengan mentransendir kotak-kotak dan kategori-kategori sosial yang artifisial. Spesiasi-semu dapat dieliminir dengan belajar menghargai budaya lain, menanggalkan arogansi nasionalisme dan keangkuhan teologis, serta mengakui dan menghargai norma dan tradisi budaya lain dengan menganggapnya memiliki hak hidup dan kesakralan yang sama dengan norma dan tradisi kita sendiri.

John Hull juga menegaskan bahwa intoleransi dan permusuhan bernuansa agama dapat dieliminir oleh strategi pendidikan yang menghargai perbedaan dan pluralitas agama dan budaya di sekolah-sekolah dan agen-agen sosialisasi penting lainnya, seperti gereja/ masjid/ sinagog/kuil/pura, keluarga, dan juga media massa dalam artiannya yang luas. Hull merekomendasikan tiga strategi: (1) mengganti agamaisme dengan tradisi spiritual yang *genuine* dan otentik, sambil mengupas bias politik dan sejarah yang divisif; (2) menekankan bahwa tujuan universal agama-agama adalah sama, bahwa semua agama bekerja untuk tujuan yang sama (*common goals*), yaitu menghadirkan spirit Tuhan di bumi, menciptakan surga di muka bumi; dan (3) mengganti dakwah agamaisme yang cenderung menghujat agama lain dan bertujuan mengkonversi pemeluk agama lain dengan dakwah agama otentik yang bertujuan menegakkan keadilan dan perdamaian, serta menghadirkan Tuhan dalam kehidupan fana manusia. Johan Galtung menguatkan bahwa dengan *soft religion*, maka upaya menciptakan perdamaian di dunia dapat

pula dicapai dengan melakukan dialog intra-agama dan antar-agama, yang mengedepankan aspek lembut dari keberagamaan dan agama yang otentik.

Akhirnya, baiklah saya tutup sumbangan ini dengan mengutip William T. Cavanaugh. Dalam buku terbarunya, *The Myth of Religious Violence* (2009). Ia menyatakan bahwa secara intrinstik, tidak ada satu pun agama yang membawakan gagasan dan pesan kekerasan. Kekerasan muncul karena manipulasi ekonomi dan politik yang kerap dilakukan oleh negara-bangsa sekular dalam mempromosikan demokrasi liberal di wilayah-wilayah dan peradaban yang menjadi target praktik hegemoninya sebagai kelanjutan dari imperialisme berformat baru. Dengan keyakinan bahwa agama-agama sejatinya membawakan pesan keadilan dan perdamaian, maka upaya kita untuk menegakkan keberagamaan yg berpihak pada keadilan dan perdamaiman secara santun, inklusif dan progresif *insya Allah* menjadi semakin mantap.***